



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga. LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan. maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Teluk Nilau. Januari 2026

Camat PENGABUAN



ISMAIL, S.Pd.I., M.H
NIP. 19790508 200604 1 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi dan bertanggung jawab. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan

dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Misi kedua “Berkah dalam peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdapat 3 sasaran antara lain :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan public Kecamatan, dengan indikator kinerja
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Nilai AKIP OPD
2. Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja
 - Rata-rata indeks Desa
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, dengan indikator kinerja
 - Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor

Pada sasaran strategis Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat target Kecamatan Pengabuan pada Tahun 2025 sebesar 85,00 dengan realisasi 84,23 sehingga capaian kinerja sebesar 99%, sedangkan target Nilai AKIP Kecamatan Pengabuan sebesar 79 dengan realisasi sebesar 66,13 dengan sehingga capaian

nilai AKIP sebesar 85%, untuk sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan dengan indikator kinerja Rata-rata indeks Desa dengan target 63,80 realisasi 62,86 dengan realisasi 99%, dan sasaran strategis Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Pengabuan serta bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya demi mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik

Dari Hasil Penilaian Kinerja Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025 Secara Umum Menunjukkan Hasil Capaian Kinerja Yang Baik Dengan Tingkat Capaian Kinerja Secara Keseluruhan Dari Realisasi Keuangan 93.44% Dan Dari Pelaksanaan Kegiatan Fisik Dengan Capaian 92.93%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Pengabuan serta bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya demi mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	11
F. SUMBER DAYA MANUSIA	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
1. Visi	18
2. Misi	22
3. Tujuan	
4. Sasaran	
5. Indikator	
6. Program	
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025	
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	26
C. REALISASI ANGGARAN	34
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN – LAMPIRAN:	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	

CASCADING TAHUN 2025
INDIKATOR KINERJA UTAMA



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Pengabuan sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Pengabuan. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Pengabuan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Pengabuan.

2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Pengabuan.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Pengabuan.
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pengabuan.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Printer, Komputer

D. KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. pelayanan publik. pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum. Seksi Kesejahteraan Sosial. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud. Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan. kepegawaian. penatausahaan aset dan perlengkapan. kerja sama. dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis. rencana kerja. rencana program dan anggaran. pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja. perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan. evaluasi. dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan. pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian. ketatausahaan. penatausahaan aset. kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi. promosi. kepangkatan. cuti. disiplin. pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat. tata naskah dinas. dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian. ketatausahaan. peraturan perundang-undangan. tatalaksana. dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset. dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran. koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan. pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj). Rencana Strategis (Renstra). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan. perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai. pengendalian keuangan. pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup

pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan. evaluasi. dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan. ketertiban umum. wawasan kebangsaan. perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak. retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan. supervisi. fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan

musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;

- c. melakukan pembinaan. pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. pemberdayaan perempuan. karang taruna. pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis. pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;

- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. struktur organisasi Kantor Kecamatan Pengabuan adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan. pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini. perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan. sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2025 sebanyak 15 orang. dengan klarifikasi berdasarkan golongan. jabatan. serta pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pengabuan
Tahun 2025

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1	Eselon III	2	13,3
2	Eselon IV	9	60
3	Staf	4	26,7
	Jumlah	15	100
	Pendidikan		
1.	S2	1	6,7
2.	S1	10	66,7
3.	D3	-	-
4.	SMA	4	26,6
	Jumlah	15	100%

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Visi.

“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi)

2. Misi.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi kedua yaitu Berkah dalam Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berintegritas dan adaftif

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan
2. Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025 adalah

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Nilai AKIP OPD
- Rata-rata Indeks Desa
- Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor

6. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outcome hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran yang dimiliki yaitu :

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- c. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar Renstra Kecamatan Pengabuan memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berintegritas dan adaptif					
Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan public Kecamatan					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Komponen SKM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi		Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas

		Kepegawai an Perangkat Daerah		Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan
		Administra si Umum Perangkat Daerah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Pera aturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

				Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata indeks desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan

				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteram	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

KETERTIBAN UMUM	melalui koordinasi lintas sektor (%)	an dan Ketertiban Umum	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

Pada tahun anggaran 2025. rencana kerja tahunan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk program. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2025. dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Persen	100
A	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	14
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN	Persen	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	26
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	59
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Persen	100
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4
3	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan	Unit	1
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air. dan listrik yang disediakan	Laporan	12

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Mutu Pelayanan	82
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Laporan	3
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeritahn dengan perangkat	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan	Laporan	2

	daerah dan Instansi Vertikal terkait	instansi vertikal terkait		
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Dokumen	12
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang terselesaikan	Laporan	12
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persen	100
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kegiatan	10
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	4
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan	Pokmas	34

		masyarakat di Kelurahan		
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100
A	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi. rekomendasi. dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	12
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2025 pada Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 pada Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel
Perjanjian Kinerja Camat Pengabuan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
----	-------------------	-------------------	--------

1	2	3	4
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	1. Survey Kepuasan Masyarakat	85,00
		2. Nilai AKIP OPD	78 (BB Kategori)
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	63,80
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Pengabuan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pengabuan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Pengabuan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengabuan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengabuan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	85,00	84,23	99%
		Nilai AKIP OPD	78,00	66,13	85%
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	63,80	62,86	99%
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%

Pengukuran. Evaluasi. dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pengabuan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	%	85,00	84,23	99%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan	%	100	100	99%
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

No.	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		%
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Survey Kepuasan Masyarakat	88,25	78,3	81,58	85,00	84,23	99%
2	Nilai AKIP OPD	56	50,27	50,29	78	66,13	85%
Rata-rata Capaian Kinerja							92%

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 84,23 di peroleh dari hasil Quisioner Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan pada Kecamatan Pengabuan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 66,13 hal itu dikarenakan pada tahun 2025 Kecamatan mengikuti kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP, tetapi Kecamatan Pengabuan harus dapat menggali informasi dan pengetahuan terkait Penyusunan dokumen SAKIP agar ditahun berikutnya nilai SAKIP dapat meningkat lagi.

Solusi agar tercapainya target indikator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan :

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut,
2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		%
					Target	Realisasi	
1	Rata-rata Indeks Desa	0.647	0.64	0.64	63,80	62,86	99%
	Rata-rata Capaian Kinerja						99

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Kode Desa	Nama Desa	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA	NILAI INDEKS	Status IDM 2025
1		MEKAR JATI	18,27	5,99	11,03	8,97	5,19	10,40	59,84	Berkembang
2		PARIT BILAL	17,79	9,61	16,85	7,40	5,67	9,61	66,93	Berkembang
3		DESA PARIT PUDIN	16,06	7,56	13,86	7,24	6,30	6,62	57,64	Berkembang
4		PARIT SIDANG	19,05	7,25	13,39	8,03	4,88	9,92	62,52	Berkembang
5		SUNGAI PAMPANG	16,69	8,03	13,23	5,98	7,24	8,19	59,37	Berkembang
6		SUNGAI RAYA	17,79	8,66	10,71	6,61	6,93	7,09	57,79	Berkembang
7		SUNGAI SERINDIT	16,38	6,30	10,87	5,98	7,40	11,18	58,11	Berkembang
8		SUNGAI BAUNG	15,75	8,66	17,01	9,13	7,24	7,56	65,35	Berkembang
9		KARYA MAJU	21,10	10,40	18,74	9,13	7,08	9,29	75,75	Maju

10		PASAR SENIN	20,00	7,25	13,23	7,56	5,19	9,14	62,36	Berkembang
11		SUAK SAMIN	15,90	9,77	13,07	6,61	4,25	9,14	58,74	Berkembang
12		SUNGAI JERING	19,53	6,93	15,91	9,13	7,24	11,18	69,92	Maju
Nilai rata-rata IDM Kecamatan PENGABUAN									66,90	

Dari nilai rata-rata Indeks Membangun Kecamatan Pengabuan tahun 2025 sebesar 66,90 dimana Desa-desa di Kecamatan Pengabuan masih berstatus Berkembang. Terdapat 10 Desa yang memiliki status berkembang dan 2 desa dengan status desa maju.

Sasaran 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		%
					Target	Realisasi	
1	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Rata-rata Capaian Kinerja						100
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTM Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Pengabuan.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,23	85,00	99%
		2. Nilai AKIP OPD	66,13	78,00	85%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan	Rata-Rata Indeks Desa	62,86	63,80	99%
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Melalui Koordinasi Lintas Sektor	100%	100%	100%

	perlindungan masyarakat				
--	-------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel diatas tingkat kemajuan capaian sasaran strategis dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk indikator Survey Kepuasan Masyarakat memiliki target 85,00 dengan realisasi 84,23 sehingga tercapai realisasi dengan persentase 99% dari target Renstra Kecamatan. Nilai AKIP Kecamatan Pengabuan Tahun 2025 memiliki Target 78 dengan Realisasi 66,13 (B). sedangkan untuk Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor untuk realisasi tahun 2025 mencapai 100% yang nilainya sama dengan target Rentra Kecamatan sebesar 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Standar Nasional

Dikarenakan tidak adanya pembanding Standar Nasional, maka disini kami mencoba menggunakan pembanding realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Kabupaten	Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,23		
		2.Nilai AKIP OPD	66,13		
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan	Rata-Rata Indeks Desa	62,86		
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Melalui Koordinasi Lintas Sektor	100%		

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengabuan dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat capaian sebesar % dimana realisasi Kecamatan Pengabuan dengan nilai 84,23, sedangkan untuk perbandingan nilai AKIP Kecamatan Pengabuan dengan realisasi AKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai Dimana Kecamatan Pengabuan memperoleh nilai 66,13 (B).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pengabuan secara umum disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti laptop, komputer dan printer

Melihat permasalahan tersebut di atas. upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang. sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan PENGABUAN melalui berbagai pendidikan. latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.

2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku. sehingga aparat Kecamatan PENGABUAN khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 6.026.892.195,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.632.702.469,00 atau 93,5% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 394.189.726,00 yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp. 1.926.181.320,00 realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.667.539.946,00 atau 86,6% atau sisa anggaran sebesar Rp. 258.641.374,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 3.272.434.475,00

realisasi per 31 Desember 2025 sebesar 96% atau Rp. 3.138.067.623,00 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 134.366.852,00

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 828.276.400 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 827.094.900 atau 99,86 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 1.181.500,00

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2025. Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi		
				Target Capaian Kinerja	Keuangan (Rp)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.489.308.520		2.203.092.894	88,50%
A	perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	27.960.000	100%	27.960.000	100,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	27.960.000	8 Dokumen	27.960.000	10000,00%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.008.216.320	100%	1.749.574.946	87,12%

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1.926.181.320	13 Orang	1.667.539.946	86,57%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.035.000	12 Dokumen	82.035.000	100,00%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	18.200.000	100%	18.200.000	100,00%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Pelengkap	26 Paket	18.200.000	26 Paket	18.200.000	100,00%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	246.179.750	100%	206.237.803	98,94%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	9.623.000	15 Paket	9.623.000	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59 Paket	37.817.000	59 Paket	37.817.000	100,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	14.220.000	12 Paket	14.220.000	100,00%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	15.659.200,00	7 Paket	15.554.200	99,33%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	68.268.000	12 Laporan	65.105.300	95,37%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.000.000	100%	57.965.600	98,25%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	20.000.000	1 unit	19.160.000	95,80%
	Pengadaan Mebel	1 unit	4.900.000	1 unit	4.884.000	99,67%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	34.100.000	4 unit	33.921.600	99,48%

F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	165.025.000	12 Bulan	147.202.467	89,20%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000	12 Laporan	2.200.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 Laporan	38.400.000	12 Laporan	24.372.479	63,47%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	124.425.000	12 Laporan	120.629.988	96,95%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	65.320.000	100%	59.870.381,00	91,66%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	55.750.000	6 unit	50.300.381	90,22%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	9.570.000	10 unit	9.570.000	100,00%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,00	14.105.000	84,23	14.105.000	100,00%
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kali	14.105.000	2 Kali	14.105.000	100,00%
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 Laporan	14.105.000	2 Laporan	14.105.000	100,00%

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	3.523.478.675	100%	3.415.504.575	96,94%
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	2.297.602.275	10 Kali	2.291.602.275,00	99,74%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2.291.602.275,00	8 Laporan	2.291.602.275,00	100,00%
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	1.225.876.400	2 Kegiatan	1.123.902.300,00	91,68%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	769.276.400	4 Unit	769.129.300	99,98%
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34 Pokmas	456.600.000	34 Pokmas	354.773.000	77,70%
JUMLAH			6.026.892.195		5.632.702.469	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pengabuan Tahun 2025 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Pengabuan telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan PENGABUAN. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Teluk Nilau, Januari 2026

Camat PENGABUAN



ISMAIL, S.Pd.I., M.H
NIP. 19790508 200604 1 016

TANJUNG JABUNG BARAT



SERENGKUH DAYUNG SERENTAK KETUJUAN